

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Manajemen

2.1.1.1 Pengertian Manajemen

Menurut Samsudin (2006, hlm.15) Secara etimologis, *manajemen* berasal dari Bahasa Inggris yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage* yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari bahasa italia, *maneggio*, yang diadopsi dari bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang berarti tangan. Menurut Malayu Hasibuan (1987, hlm.2) dalam hal mengatur, akan timbul masalah, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa diatur, dan apa tujuan peraturan tersebut.

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi dari para ahli. Menurut Patterson dan E.G. Plowman dalam Hasibuan (2004, hlm.3) manajemen didefinisikan sebagai suatu teknik, maksud dan tujuan dari sekelompok manusia tertentu yang ditetapkan, dijelaskan, dijalankan. Manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan individu-individu untuk memutuskan, menguraikan, dan mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan kapasitas dan mengatur fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia/kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Handoko (2013, hlm.8).

Manajemen menurut Hasibuan (2004, hlm.3) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Manajemen dalam beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, manajemen merupakan serangkaian kegiatan untuk merencanakan, melakukan pengorganisasian, mengawasi, serta menilai / mengevaluasi kegiatan suatu

program, kemudian mengembangkan sumber daya manusianya, mendayagunakannya, mengatur sarana dan prasarana secara efektif efisien untuk mencapai tujuan program / organisasi yang diharapkan dengan semaksimal mungkin. Manajemen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

2.1.1.2 Unsur Manajemen

Manajemen berfungsi sebagai pembinaan pasda suatu program atau organisasi, yang memiliki hubungan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya dan dilaksanakan oleh orang-orang, lembaga, atau bagian lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dalam manajemen, terdapat pula unsur-unsur dalam manajemen yang harus diatur, dikenal sebagai 6M. Hasibuan (2004, hlm.21) mengemukakan:

- 1) *Man* (manusia); tenaga pimpinan maupun tenaga kerja operasional.
- 2) *Money* (uang); dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
- 3) *Methods* (metode); cara yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan.
- 4) *Materials*; bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 5) *Machines* (mesin/alat); dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- 6) *Market* (pasar); tempat untuk mendistribusikan dan menjual barang / jasa yang dihasilkan.

2.1.1.3 Tujuan Manajemen

Menurut Sadili Samsudin (2006, hlm.30) “memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara bertanggungjawab secara strategis, etis, dan sosial” Tujuan manajemen hendaknya ditetapkan secara logis, rasional, realistis, dan ideal; berdasarkan fakta di lapangan, kemampuan, serta potensi yang dimiliki; dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial, agama, moral, serta peraturan-peraturan pemerintah.

Menurut sifatnya tujuan manajemen terbagi atas: Hasibuan (2015, hlm.22):

- 1) *Management objectives*, tujuan dari segi efek yang harus ditimbulkan dari manajer
- 2) *Managerial objectives*, tujuan yang harus dicapai melalui daya-upaya atau aktivitas yang memerlukan manajemen umum.
- 3) *Administrative objectives*, tujuan-tujuan yang pencapaiannya memerlukan administrasi.
- 4) *Economics objective*, tujuan yang bermaksud memenuhi kebutuhan dan memerlukan efisiensi untuk pencapaiannya.
- 5) *Social objectives*, tujuan suatu tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral.
- 6) *Technical objectives*, tujuan berupa detail teknis, detil karya, atau detil kerja.
- 7) *Work objectives*, tujuan yang merupakan kerampungan suatu pekerjaan.

2.1.1.4 Fungsi Manajemen

Untuk mempermudah analisa, para ahli mengemukakan bahwa manajemen terdiri dari beberapa fungsi fundamental. Agar lebih terfokus, peneliti mengutip fungsi manajemen menurut G.R. Terry, yaitu *planning, organizing, actuating, controlling*. Namun pada penelitian ini, peneliti perlu menambahkan satu fungsi, yaitu Evaluasi (*evaluating*) untuk bisa mengetahui kelengkapan data mengenai judul yang diangkat.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah kumpulan keputusan-keputusan awal yang akan dilaksanakan. Planning adalah suatu proses untuk untuk menentukan Plan (rencana), diproses oleh planner (perencana), dan hasilnya adalah plan (rencana). Rencana merupakan dasar pengendalian, karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Menurut Sarinah (2017, hlm.27), perencanaan ialah rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga berupa petunjuk yang harus diikuti jika menginginkan hal yang diinginkan tercapai dengan baik.

Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulations of proposed activation believed necessary to achieve desired result. George R. Terry dalam Hasibuan (2004, hlm.95)

(Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan kebenaran serta membuat dan memanfaatkan praduga mengenai jangka panjang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan).

Menurut Scaffer dalam Sudjana (2000, hlm.61) mengatakan bahwa apabila perencanaan di bicarakan, maka kegiatan ini tidak akan terlepas dari hal hal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan sasaran maupun prosedur program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diharapkan.

Proses penyusunan rencana, Amirullah dan Hanafi (2002, hlm.56-57) adalah:

- a) Merumuskan misi dan tujuan.
- b) Memahami keadaan saat ini.
- c) Mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan.
- d) Menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan.

Jenis-jenis rencana menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2004, hlm.99) adalah:

- a) *Objective*; sasaran
- b) *Policy*; kebijaksanaan
- c) *Procedure*.
- d) *Method*.
- e) *Program*.
- f) *Budget*.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut Siagian dalam Sudjana (2000, hlm.114), memberikan batasan-batasan pengorganisasian sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari kumpulan individu, instrumen, tugas, wewenang dan tanggungjawab, alat dan tenaga ahli sedemikian rupa sehingga menjadikan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Amirullah dan Hanafi (2002, hlm.97-98) menyatakan bahwa badan, wadah, dan tempat dari perkumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu disebut dengan organisasi.

G.R. Terry dalam Hasibuan (2015, hlm.122) memberikan pengertian mengenai pengorganisasian sebagai berikut: (1) pengorganisasian dalam pengertian real sense menunjukkan hubungan antara manusia sebagai akibat organisasi; (2) pengorganisasian dalam pengertian abstrak menunjukkan hubungan antara unit-unit/departemen kerja. Menurut Sarinah (2017, hlm.43) Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang dapat berupa sinkronisasi dan kombinasi SDM, sumber daya fisik dan keuangan untuk tercapainya tujuan dalam kelompok, juga didefinisikan sebagai pembagian posisi, peran pekerjaan dan tanggungjawab.

Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian meliputi perencanaan program pendidikan, pemanfaatan SDM yang terdiri dari individu yang memenuhi syarat dan kebutuhan yang diinginkan, kemudian aset non-manusia termasuk kantor, yayasan, aparatur, bahan, dan biaya yang dapat diakses untuk melaksanakan suatu penataan atau serangkaian kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

George R. Terry dalam Hasibuan (2004, hlm.183) mengemukakan pengertian Penggerakan adalah untuk membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bersemangat untuk mencapai

tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Menurut Sudjana (2004, hlm.207), fungsi pelaksanaan adalah untuk mewujudkan tingkat penampilan dan partisipasi yang tinggi dari setiap pelaksanaan yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian dan Sutomo (2012, hlm.14) mendefinisikan *actuating* sebagai keseluruhan upaya, teknik, cara, metode, dan strategi secara umum untuk mendorong individu-individu organisasi agar mau bekerja sebaik mungkin dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara produktif, dan ekonomis. Dengan demikian, penggerakan merupakan kegiatan tindak lanjut setelah perencanaan dan pengorganisasian selesai disusun, tidak akan ada hasil (*output*) jika proses pelaksanaan tidak dijalankan.

4) Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Menurut Earl P Strong dalam Malayu Hasibuan (2004, hlm.241) Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sutomo, 2012, hlm.16). Upaya memantau penampilan para pelaksana program dan upaya memperbaiki kegiatan yang berjalan disebut dengan pengawasan. (Sudjana, 2000, hlm.212).

Menurut Sarinah (2017, hlm.105) pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari individu yang sudah memiliki tugas dan wewenang perlu dilakukan pengawasan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, visi, misi lembaga. Fungsi ini tidak kalah penting dari pengorganisasian, semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa disertai

pengawasan. Ernie dan Saefullah (2005, hlm.317), mengemukakan, fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.

Jadi, fungsi pengawasan /pengendalian adalah berperan dalam memeriksa semua kegiatan dan menjamin bahwa kegiatan-kegiatan ini telah dikoordinasikan dengan tepat untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dari awal dan jika ditemukan penyimpangan atau perbedaan dalam realisasi, kegiatan perbaikan perlu diambil.

Menurut Sutomo, dkk (2012, hlm.17) Proses dasar pengawasan terdiri atas tiga tahap, yaitu:

- a) Penentuan standar hasil kerja.
 - b) Pengukuran hasil pekerjaan.
 - c) Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.
- 5) Evaluasi (*Evaluating*)

Syamsu Mappa dalam Djudju Sudjana (2006, hlm.21) Memberikan pengertian bahwa evaluasi program pendidikan di luar sekolah adalah suatu gerakan yang dilakukan untuk memutuskan berhasil dan tidaknya suatu program pendidikan. Sedangkan Stake dalam Djudju Sudjana (2006, hlm.21) menguraikan bahwa evaluasi program adalah tindakan untuk menjawab suatu program yang telah, sedang, dan akan diaktualisasikan.

Tujuan evaluasi menurut Djudju Sudjana (2006, hlm.36-46) terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum evaluasi program adalah untuk menyediakan atau menampilkan informasi sebagai masukan untuk membuat pilihan keputusan mengenai program tersebut. Tujuan khusus evaluasi bermacam-macam, di antaranya sebagai berikut ini :

- a) Memberi masukan untuk perencanaan program.

- b) Memberi masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program.
- c) Memberi masukan untuk modifikasi program.
- d) Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program.
- e) Memberi masukan untuk motivasi dan pembinaan pengelola dan pelaksana program.
- f) Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program.

2.1.2 Program Kesetaraan Paket C

2.1.2.1 Pengertian Program Kesetaraan Paket C

Program adalah suatu rencana yang konkret. Rencana ini konkret karena dalam sebuah program sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, maupun anggarannya. Dengan demikian program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing.

Program kesetaraan paket C setara dengan SMA adalah pelayanan pendidikan pada jenjang menengah kejuruan melalui jalur non-formal. Program paket C merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang karena berbagai sebab tidak melanjutkan pendidikan. Dasar hukum penyelenggaraan paket C adalah:

- 1) Pembukaan UUD 1945 alinea 4 berbunyi:

“kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

- 2) UU No.20 tahun 2003 tentang sisdiknas

“bahwa sistem pendidikan dibagi menjadi dalam tiga jalur adalah pendidikan informal (pendidikan keluarga), formal (pendidikan sekolah), pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah).”

Dalam peraturan pemerintah no.73 tahun 1991 tujuan Pendidikan Luar Sekolah diantaranya adalah; (1) Melayani warga belajar yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan sekolah formal, (2) Melayani warga belajar untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka meningkatkan martabat serta mutu pendidikan, (3) Mmebina warga belajar agar mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna menjadi bekal untuk mencari nafkah atau pendapatan sehingga tarag kehidupannya meningkat.

2.1.2.2 Standar Kompetensi Program Kesetaraan Paket C

a. Standar Kompetensi Kecakapan Hidup

Setiap lulusan kesetaraan paket C diharapkan mampu memiliki kecakapan hidup. Standar kompetensi kecakapan hidup menurut Depdiknas (2006, hlm.10) meliputi:

- 1) Kecakapan personal, kecakapan ini yakni urusan setiap mahluk dengan tuhan, Tuhan YME, berakhlak mulia, berfikir secara rasional, memahami diri serta percaya diri, bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri.
- 2) Kecakapan sosial, kecakapan ini merupakan kompetensi berkelompok dan bekerjasama, menunjukkan tanggung jawab sosial, berinteraksi dengan masyarakat sekitar serta dapat mengendalikan emosi.
- 3) Kecakapan intelektual, merupakan kecakapan menguasai ilmu pengetahuan, penggunaan metode serta penelitian ilmiah, mengembangkan kapasitas berfikir strategis untuk belajar sepanjang hayat, serta berkomunikasi dengan ilmiah.
- 4) Kecakapan vokasional, merupakan kompetensi yang berkaitan dengan bidang keahlian atau keterampilan fungsional, seperti menjahit, otomotif, berwirausaha, dan keterampilan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

b. Standar Kompetensi Lulusan Kesetaraan Paket C

Lulusan Kesetaraan Paket C menurut Depdiknas (2006, hlm.11) mempunyai kompetensi sebagai berikut :

- 1) Keyakinan, ketaqwaan, dan mewujudkannya dalam berfikir serta berperilaku sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
- 2) Memiliki perasaan dan tanggungjawab sosial.
- 3) Kemampuan bekerja atau berusaha mandiri membuka lapangan pekerjaan.
- 4) Pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan bekerja mandiri atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- 5) Percaya dengan kemampuannya, berfikir terbuka, kreatif, inovatif.
- 6) Kemampuan berfikir, memberi alasan, dan menghadapi masa depan dengan percaya diri.
- 7) Pemahaman antara hak dan kewajibannya untuk bekerja produktif, bertanggungjawab, dan kompetitif.
- 8) Bekerja keras, bangga akan pekerjaan dan bekerjasama dengan orang lain.
- 9) Pemahaman tentang kepemimpinan.
- 10) Kemampuan berolahraga atau menjaga kesehatan kebugaran jasmani.
- 11) Berkespresi dan penghargaan terhadap seni dan keindahan.

2.1.3 Peningkatan Mutu Pendidikan

2.1.3.1 Pengertian Peningkatan Mutu Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Peningkatan merupakan kata benda dengan arti proses, cara, atau perbuatan meningkatkan sesuatu untuk kemajuan”.

Mutu Pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Mutu adalah ukuran, baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb)”. Secara istilah mutu adalah “kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mutu pendidikan sangat tergantung dari program pendidikan yang dilaksanakan. Dengan demikian mutu adalah

tingkat kualitas yang sudah memenuhi atau dapat dikatakan telah melebihi dari apa yang diharapkan.

Jadi, peningkatan mutu pendidikan adalah suatu upaya mengembangkan kemampuan, sikap, yang berakhlak disegala bidang untuk dapat mewujudkan keberhasilan pendidikan yang sehingga dapat meningkatkan kualitas atau bisa kita sebut dengan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah, baik itu pendidikan formal maupun nonformal. Menurut Supriano (Dirjen GTK Kemendikbud), terdapat empat komponen yang harus diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu :

1) Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama kebijakan yang berlaku secara nasional seperti; kurikulum dan ujian nasional. Itu merupakan kebijakan distribusi dan rekrutmen guru/tutor.

2) Kepemimpinan

Kepemimpinan (leadership) seorang kepala sekolah berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Gaya kepemimpinan, transparansi keuangan, hubungan antara tutor dengan kepala, hubungan tutor dengan warga belajar dan seluruh yang ada di satuan pendidikan harus berjalan baik.

3) Infrastruktur

Infrastruktur meliputi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

4) Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang menyenangkan, berinovasi dan penuh kreativitas akan mendorong animo peserta didik. Tetapi, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi, keabilitas, dan kemampuan guru/tutor. Proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga menunjang dalam memenuhi empat kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa untuk menghadapi tantangan abad 21. Empat kompetensi

itu biasa disingkat 4C; *Critical Thinking, Collaboration, Communication*, dan *Creativity* atau kreatifitas.

2.1.3.2 Karakteristik Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan diukur secara universal baik dari segi input, proses, dan output. Ada 13 karakteristik yang dinilai dalam hal mutu pendidikan, yaitu: kinerja, handal, daya tahan, indah, hubungan manusiawi, mudah penggunaannya, khusus, standar tertentu, konsistensi, seragam, mampu melayani, ketepatan.

Kinerja, yaitu berkaitan dengan aspek fungsional sekolah yang meliputi kinerja guru dalam mengajar. Waktu wajar, yaitu memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Handal, yaitu orang yang dilayani merasa puas atas pelayanan yang diberikan Daya tahan, berarti tahan banting misalnya saat terjadi krisis atau pandemi pada saat sekarang sekolah tetap bertahan. Indah/estetis, sekolah yang ditata dengan baik dan menarik. Hubungan manusiawi, yaitu menjunjung tinggi nilai moral dan profesionalisme. Mudah penggunaannya, yaitu sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses belajar.

Khusus yaitu berupa keunggulan tertentu misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi. Standar tertentu artinya memenuhi standar. Konsistensi, yaitu kejelasan dan stabil, mutu pendidikannya tidak menurun. Seragam, artinya sekolah menerapkan aturan tidak pandang bulu. Mampu melayani, yaitu sekolah dapat memberikan pelayanan terhadap saran atau masukan. Ketepatan, yaitu tepat dalam memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan pelanggan sekolah.

2.1.4 Manajemen Berbasis Sekolah

2.1.4.1 Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Slamet PH (2000), mengemukakan bahwa istilah MBS berasal dari tiga kata yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah sinkronisasi dan penyerasian sumber daya melalui beberapa input manajemen untuk menggapai

tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis berarti “berdasarkan pada” atau “berfokuskan pada”. Sekolah adalah organisasi terbawah dalam runtutan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bertugas memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik atas ketentuan yang bersifat legalistik dan profesionalistik.

Nurkolis (2006, hlm.11), mengemukakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih kepada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa MBS merupakan suatu upaya untuk mengikutsertakan seluruh komponen sekolah dalam membangun pendidikan, sehingga tanggung jawab tidak berada hanya pada satu tangan saja yaitu kepala sekolah.

2.1.4.2 Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Karakteristik MBS identik dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MBS dianggap sebagai kerangkanya maka sekolah efektif adalah isinya. Karakteristik MBS memuat elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi *input*, proses, dan *output*.

Input pendidikan adalah sesuatu yang harus tersedia untuk berjalannya suatu proses berupa sumberdaya. *Input* sumberdaya meliputi sumber daya manusia yang didalamnya adalah kepala sekolah, guru/tutor, konselor, staf, dan warga belajar, sumber daya selebihnya berupa peralatan, perlengkapan, dan dana. *Input* pendidikan antara lain; 1) memiliki kebijakan visi, misi, tujuan yang jelas, 2) sumberdaya tersedia, 3) staf yang kompeten, 4) fokus pada peserta didik, 5) *input* manajemen.

Proses merupakan pengaruh dari input, dan hasil dari proses merupakan *output*. Proses pendidikan meliputi pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, dan proses belajar mengajar. *Output* pendidikan adalah prestasi yang didapat dari proses pembelajaran dan manajemen.

Output dapat dilihat dari kinerja sekolah yang terlihat dari keefektifannya, kualitasnya, produktivitasnya, efisiensi, inovasi, kualitas dan moral kerja.

2.1.4.3 Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Tujuan pelaksanaan MBS adalah untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru/tutor, karyawan/staf, siswa/warga belajar, orangtua, dan masyarakat sekitar), tujuan MBS bukan hanya sekedar mendongkrak prestasi warga belajar, tetapi melakukan pemberdayaan sekolah. MBS yang berhasil adalah jika sekolah diberdayakan dengan baik, sedangkan prestasi belajar hanya efek dari MBS. Ciri sekolah yang berdaya adalah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, bersifat adaptif, antisipatif dan proaktif serta bertanggungjawab dan komitmen yang tinggi terhadap sekolah.

Tujuan inti dari MBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan MBS, sekolah dan masyarakat tidak perlu menunggu perintah dari pusat. Mereka dapat membuat visi instruktif yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan melaksanakan visi dengan bebas.

2.1.5 Standar Nasional Pendidikan

Menurut PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengingat dari isi UU No.20 Tahun 2003 Bab II pasal 2 menyebutkan; Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Berikut adalah lingkup Standar Nasional Pendidikan:

2.1.5.1 Standar Isi

Berdasarkan PP No.19 tentang SNP sebagaimana telah diubah dalam PP No.32 tahun 2013 ditetapkan bahwa standar isi merupakan kriteria mengenai cakupan materi dan kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan. Komponen standar isi terdiri dari kurikulum yang sudah sesuai dan sekolah sudah menyediakan kebutuhan bagi pengembangan pribadi peserta didik.

2.1.5.2 Standar Proses

Standar proses merupakan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran sebaiknya diselenggarakan secara interaktif,

insporatif, menyenangkan, menantang peserta didik untuk berperan aktif dengan minat bakat dan perkembangan fisik maupun psikologis. Komponennya meliputi; silabus sudah relevan dengan standar, RPP mencapai pembelajaran yang efektif, sumber belajar mudah digunakan, metode belajar interaktif dan kreatif, kemudain evaluasi yang dilakukan secara berkala.

2.1.5.3 Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik yang meliputi seluruh kompetensi mata pelajaran. Peserta didik dalam standar ini diharapkan sudah mencapai target akademis dan dapat mengembangkan potensi sebagai anggota masyarakat yang diharapkan.

2.1.5.4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan harus sudah memadai, kualifikasinya memadai, serta kompetensinya sudah memadai. Standar ini adalah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik, mental dan pendidikan dalam menjabat. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang dibuktikan dengan sertifikasi.

2.1.5.5 Standar Sarana dan Prasarana

Standar ini berkaitan dengan kriteria minimal yang harus dimiliki sekolah, seperti ruang belajar, tempat beribadah, lapangan, perpustakaan, laboratorium dan sumber belajar lain termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal itu harus memadai serta sekolah pun dalam keadaan terpelihara dengan baik.

2.1.5.6 Standar Pengelolaan

Standar ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan ini menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, akuntabilitas dan keterbukaan. Pengelolaan sekolah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat

dengan visi misi yang jelas, kemudian sekolah mencantumkan tujuan yang jelas, rencana pengembangan sekolah dan pengembangan profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah.

2.1.5.7 Standar Pembiayaan

Sekolah merencanakan keuangan sesuai standar, upaya sekolah untuk mendapatkan dukungan pembiayaan lainnya serta menjamin kesetaraan akses. Dalam standar ini ada tiga macam biaya, yaitu; biaya investasi satuan pendidikan, biaya personal, dan biaya operasi satuan pendidikan seperti gaji dan tunjangan.

2.1.5.8 Standar Penilaian Pendidikan

Standar ini berkaitan dengan prosedur, mekanisme, dan instrumen penilaian. Ini digunakan untuk menilai peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non-akademik yang penilaiannya berdampak pada proses belajar, kemudian orangtua/wali peserta didik terlibat dalam proses belajar peserta didik.

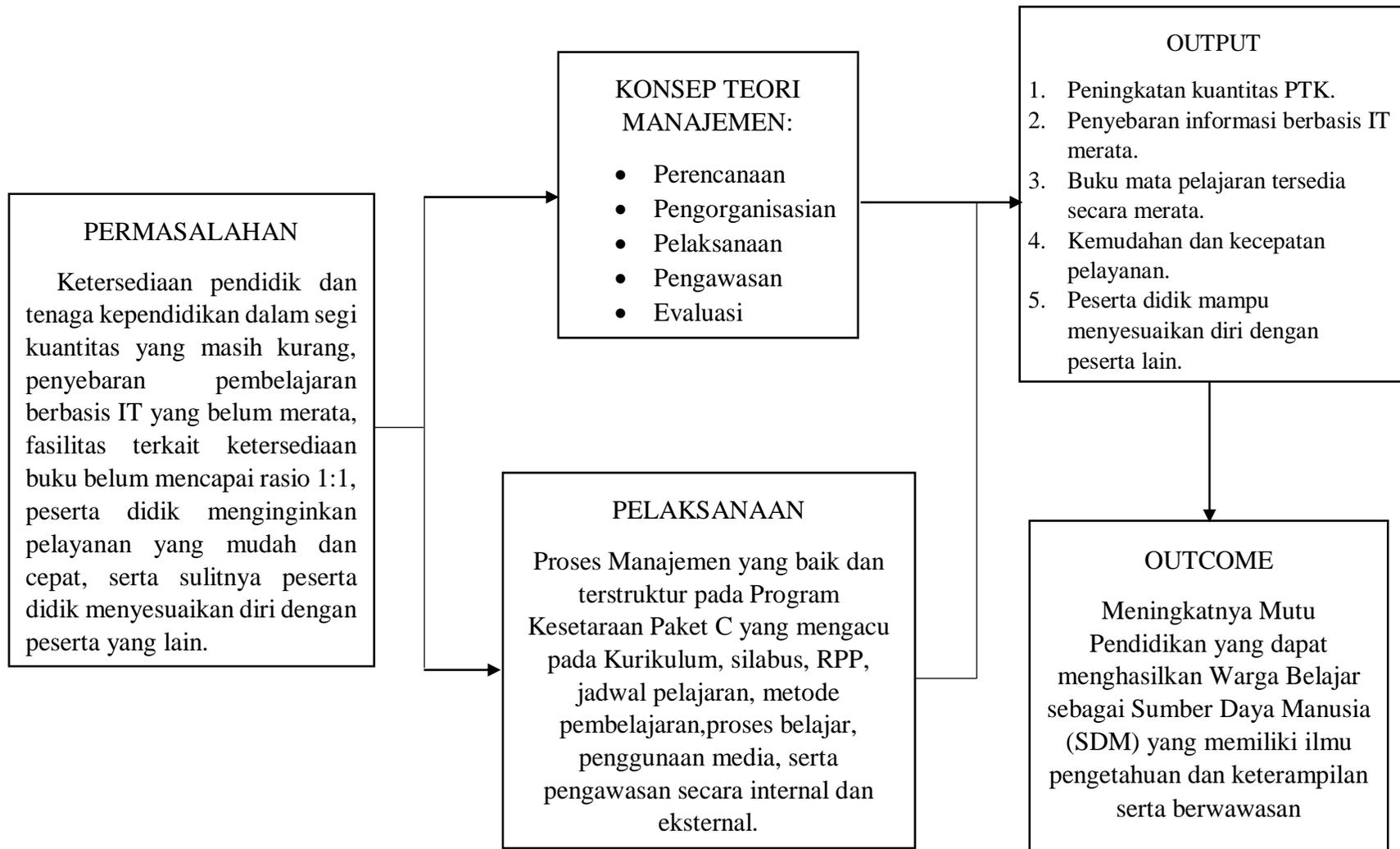
2.2 Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratna Ciptasari yang berjudul “Manajemen Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C ‘Harapan Bangsa’ di UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Unggaran Kabupaten Semarang” jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 2015. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam proses perencanaan program, perekrutan warga belajar dan tutor dilakukan oleh pihak SKB dengan menyebarkan kuesioner pada institusi terkait melalui internet dan gethok tular. Pengorganisasian program paket C di UPTD SKB Unggaran Kab. Semarang meliputi pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing. Pelaksanaannya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Pengawasan program paket C dilakukan oleh kepala SKB. Secara eksternal diawasi oleh Dirjen, penilik dinas kabupaten dan P2PAUDNI. Evaluasi program dilakukan secara sumatif dan formatif seperti ulangan harian, dan ujian akhir semester.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amalia dengan judul “Manajemen Program Life Skill di MAN Purwokerto 2” Program Studi Kependidikan Islam, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto 2014. Dalam skripsi ini membahas mengenai manajemen program untuk Life skill, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai manajemen program untuk kesetaraan paket C.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fendi Astrianto yang berjudul “Manajemen Program Keterampilan di SMPN 3 Banyumas” Program Studi Kependidikan Islam Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto 2010. Dalam skripsi ini sama-sama mengangkat permasalahan mengenai manajemen program, hanya saja skripsi ini fokus penelitiannya kepada program keterampilan yang ada di SMPN 3 Banyumas, sedangkan penulis meneliti manajemen program untuk kesetaraan paket C.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hardhike Septyana (2013) yang berjudul “Manajemen Pembelajaran Berbasis Kompetensi Pelatihan Menjahit Di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Dukuh Siberuk, Desa Siberuk Kabupaten Batang”. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, FIP UNNES. Dalam skripsinya berisikan mengenai manajemen pembelajaran yang mengacu pada pelatihan menjahit.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Chilnamin Tamami yang berjudul “Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C di PKBM Al-Hikmah Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo” yang hasil penelitiannya yaitu pelaksana pendidikan kesetaraan yakni seluruh yayasan dan anggotanya. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket B dan C dilaksanakan tiga hari dalam satu minggu. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemenuhan tugas warga belajar sebagai peserta didik kurang baik seperti sering datang terlambat dikarenakan mereka bukan hanya sekedar siswa melainkan bekerja juga.

2.3 Kerangka Konseptual

SKB Kota Tasikmalaya yang berdiri sejak tahun 2002, memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat serta meningkatkan pengetahuannya tanpa mengenal batas umur, status dan pekerjaan bagi warga belajarnya yang ingin mendapatkan pendidikan. Dengan permasalahan yang ada, diantaranya; Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kuantitas masih kurang, penyebaran informasi pembelajaran paket C berbasis IT belum merata, fasilitas terkait ketersediaan buku mata pelajaran belum mencapai rasio 1:1, peserta didik menginginkan pelayanan yang mudah dan cepat, dan peserta didik sulit menyesuaikan diri dengan peserta lain. hal tersebut dapat diatasi dengan proses manajemen dengan konsep teori yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian melaksanakan proses manajemen tersebut dengan baik dan terstruktur yang mengacu pada kurikulum, RPP, silabus, jadwal pelajaran, metode pelajaran yang diberikan tutor, proses belajar yang berjalan, penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran serta pengawasan secara internal dan eksternal. Yang mampu mengeluarkan *output* yang diharapkan kesetaraan paket C di SKB dan memberikan *outcome* yaitu, meningkatnya mutu pendidikan yang dapat menghasilkan warga belajar sebagai sumber daya manusia yang selain memiliki ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki keterampilan dan berwawasan luas. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

- 2.4.1 Bagaimana perencanaan program pendidikan kesetaraan paket C dalam peningkatan mutu pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tasikmalaya ?
- 2.4.2 Bagaimana pengorganisasian program pendidikan kesetaraan paket C dalam peningkatan mutu pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tasikmalaya ?
- 2.4.3 Bagaimana pelaksanaan/penggerakan program pendidikan kesetaraan paket C dalam peningkatan mutu pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tasikmalaya ?
- 2.4.4 Bagaimana pengawasan/pengendalian program pendidikan kesetaraan paket C dalam peningkatan mutu pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tasikmalaya ?
- 2.4.5 Bagaimana evaluasi program pendidikan kesetaraan paket C dalam peningkatan mutu pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tasikmalaya?